

BAB III

LATAR BELAKANG DAN PROSES PENDIRIAN KEMBALI PARTAI BURUH PADA 2020 – 2021

Pada bab 3 ini berisi uraian latar belakang dan proses pendirian kembali Partai Buruh yang utamanya dibatasi dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu 2020 sampai 2021. Pembatasan waktu ini supaya pembahasan tidak terlalu lebar sehingga fokus pada proses sebelum dan pasca Partai Buruh dihidupkan kembali dengan kongres hingga memperoleh kesimpulan kenapa Partai Buruh layak dihidupkan kembali.

III.1. Latar Belakang Pendirian Kembali Partai Buruh

Pendirian kembali Partai Buruh dilatarbelakangi oleh ragam kondisi (keadaan). Berikut ini adalah uraian dari sudut pandang peneliti sebagai aktivis buruh yang bisa jadi subjektif namun mempunyai pengalaman dalam aktivitas dan advokasi dunia kerja.

III.1.a. Kemiskinan yang Akut dan Sistemik

Kemiskinan ini ditunjukkan dengan data bahwa angka kemiskinan masyarakat Indonesia mencapai angka 27,54 juta orang pada Maret 2021. Angka ini meningkat dari tahun 2020 yang berada pada kisaran 26,42 juta orang.⁴⁷ Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa angka garis kemiskinan Indonesia pada September 2021 adalah sebesar Rp 486.168 per kapita/bulan. Artinya masyarakat Indonesia dikatakan miskin apabila pengeluaran minimum per bulan tidak mencapai angka Rp 500.000.⁴⁸ Data orang miskin tentu saja lebih besar dari data yang

⁴⁷ tempo.co, “Penduduk Miskin Indonesia Naik, ini Kriteria Orang Miskin Menurut BPS,” diakses pada 16 April 2023 melalui <https://nasional.tempo.co/read/1484036/penduduk-miskin-indonesia-naik-ini-kriteria-orang-miskin-menurut-bps>.

⁴⁸ Bps.go.id, “Persentase Penduduk miskin September 2021 turun 9,71 persen”, diakses 16 April 2023 melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>.

dikeluarkan BPS, karena kategori miskin menurut BPS dihitung berdasarkan angka pengeluaran tidak lebih dari Rp 500.000 per bulan. Jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup di Jakarta saja bahkan biaya kontrakan buruh mencapai Rp 800.000 - 1.200.000 per bulan, itu di luar biaya untuk makan. Buruh di Jakarta misalnya, dapat dikategorikan miskin jika tidak sanggup makan dan memenuhi kebutuhan kesehatan serta pendidikan.

Dalam dunia kerja, angka kemiskinan dipengaruhi oleh kebijakan upah murah dan ketidakpastian hubungan kerja. Secara umum, masalah ketidakpastian hubungan kerja tercermin dengan keberadaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beleid ini melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing sehingga membuat arus fleksibilitas tenaga kerja yang berdampak pada ketidakpastian hubungan kerja.⁴⁹ Ketidakpastian hubungan kerja mengkondisikan buruh/pekerja berpindah-pindah tempat kerja dengan masa kerja yang tidak pasti, kadang bisa tiap bulan membuat perjanjian kerja baru, bahkan ada yang tidak dengan perjanjian kerja dengan status pekerja harian lepas. Hal ini berdampak pada ketidakpastian pendapatan yang mereka terima sehingga berpengaruh terhadap penyediaan sumber gizi keluarga.

Kemiskinan yang berdampak pada pengurangan pemenuhan gizi keluarga juga dialami buruh perempuan karena dampak pandemi, dimana ada PHK terhadap buruh. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan bahwa 623.407 buruh perempuan terkena PHK dan menanggung beban lebih dibanding laki-laki.⁵⁰ Selain sektor formal, sebanyak 80% buruh perempuan informal

⁴⁹ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ps. 59.

⁵⁰ CNN Indonesia, "623.407 Pekerja Perempuan Terdampak Covid," [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210105062007-532-589453/623407-pekerja-perempuan-terdampak-covid), 5 Januari 2021, diakses pada 11 Juni 2023 melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210105062007-532-589453/623407-pekerja-perempuan-terdampak-covid>.

terdampak pandemi juga tidak mendapat tunjangan. Jumlah ini lebih besar dibanding laki-laki yang berada pada kisaran 63%.⁵¹

Fakta-fakta kemiskinan ini juga diungkapkan Roza, buruh perempuan yang merasakan sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bukan hanya karena dampak pandemi tetapi juga sistem yang diciptakan dalam jangka panjang.⁵²

“... ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan diciptakan secara sistematis dalam jangka waktu lama, ini adalah fakta sejarah yang menempatkan posisi perempuan menjadi tertinggal di belakang laki-laki, termarjinalkan. Maka dengan mewakilkan buruh perempuan di Partai Buruh, berharap bisa mencapai tujuan kesetaraan hak dan perlindungan perempuan.”

Buruh perempuan merasakan kemiskinan yang akut dan sistemik karena dampak hukum ketenagakerjaan yang tidak berpihak. Hal ini menjadi salah satu alasan, kenapa buruh perempuan juga mesti berpartai. Dengan berpartai, maka ada harapan untuk mengubah sistem negara menjadi lebih baik. Harapan itu dimiliki oleh Roza dan kawan-kawannya di tempat mereka bekerja.

III.1.b. Penerbitan Regulasi yang Tidak Berpihak ke Rakyat (Buruh)

Belakangan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian berganti baju menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah itu yang sekarang menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁵¹ Infid, “Ekonomi Perempuan di Era Pandemi: Sudah Jatuh Tertimpa Tangga”, infid.org 22 Oktober 2021, diakses pada 29 Juni 2023 melalui <https://www.infid.org/news/read/ekonomi-perempuan-di-era-pandemi-sudah-jatuh-tertimpa-tangga>.

⁵² Wawancara tertulis via Whatsapp dengan Roza Febrianti, Sekretaris Bidang Olahraga, Seni Budaya, dan Pariwisata Partai Buruh sekaligus Pengurus Dewan Eksekutif Nasional FSPMI pada 29 April 2023.

No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Kehadiran beleid ini semakin menghilangkan batas-batas hubungan kerja menjadi samar-samar karena memberi peluang bagi pemberi kerja untuk menerapkan informalisasi tenaga kerja secara liberal. Pasalnya, Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak memberi batas-batas jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing.⁵³

Kondisi itu berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mana penerapan pekerjaan alih daya misalnya hanya untuk lima jenis pekerjaan yaitu *security*, *catering*, penunjang pertambangan dan perminyakan, *driver*, dan jasa *cleaning service*.⁵⁴ Batasan 5 jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing ini dicabut dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaan. Ketidakpastian hubungan kerja ini berdampak pada semakin masifnya informalisasi tenaga kerja yang dilegalkan oleh hukum. Hal-hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan untuk dihidupkannya kembali Partai Buruh.

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden merupakan produk hukum yang minim partisipasi. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja seluas mungkin.⁵⁵ Namun, bagi serikat buruh Undang-Undang Cipta

⁵³ CNBC Indonesia, “Omnibus Law: Semua Pekerjaan Bisa Outsourcing, Tiada Batas!”, [cnbc indonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20201007130006-4-192493/omnibus-law-semua-pekerjaan-bisa-outsourcing-tiada-batas#:~:text=Pada%20permenaker%20diatur%205%20bidang,jasa%20minyak%20dan%20gas%20pertambangan), 7 Oktober 2020, diakses pada 29 Maret 2023 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201007130006-4-192493/omnibus-law-semua-pekerjaan-bisa-outsourcing-tiada-batas#:~:text=Pada%20permenaker%20diatur%205%20bidang,jasa%20minyak%20dan%20gas%20pertambangan>.

⁵⁴ Permenaker 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Ps. 17 ayat (3).

⁵⁵ Presiden RI, “Presiden: UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Terhadap Iklim Usaha dan Investasi” [presidenri.go.id](https://www.presidentri.go.id) 19 November 2020, diakses pada 13 Juni 2023 melalui: <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-uu-cipta-kerja-beri-dampak-signifikan-terhadap-iklim-usaha-dan-investasi/>.

Kerja berdampak buruk bagi pekerja. DPR telah memberi contoh buruk kepada publik tentang proses pembuatan perundang-undangan yang nir partisipasi demi ambisi investasi.

Hal itu mengabaikan fungsi sesungguhnya dari lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penyeimbang dari eksekutif justru seolah tunduk pada kekuasaan eksekutif. Melemahnya fungsi pengawasan legislatif ini tak lepas dari sistem politik yang memberi ruang seluas mungkin bagi pengusaha duduk menjadi anggota dewan. Sebanyak 45,5% dari 575 anggota DPR periode 2019-2024 adalah pengusaha.⁵⁶ Sehingga wajar apabila kebijakan yang dihasilkan oleh DPR lebih dominan menguntungkan kelas pengusaha. Rakyat termasuk buruh perempuan menjadi korban dari kebijakan pemerintah.

Beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh legislatif dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fakta yang mempertegas posisi anggota dewan bukan sebagai wakil rakyat tapi wakil dari elit penguasa dan pengusaha. Beberapa regulasi itu antara lain:

- Pengesahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

⁵⁶ Majalah Tempo, "Pengusaha Kuasai Parlemen," Majalah Tempo, 5 Oktober 2019, diakses pada 13 Juni 2023 melalui <https://majalah.tempo.co/read/nasional/158519/pengusaha-kuasai-parlemen>.

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang tersebut merupakan contoh konkrit bagaimana negara menggunakan kekuasaan legislatif semata-mata sebagai mesin yang memproduksi perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rakyat. Tawar menawar materi muatan dengan landasan kepentingan politik jangka pendek dan ekonomi semata tersebut dapat merugikan rakyat.⁵⁷

Selain itu, penggunaan metode Omnibus Law yang merombak berbagai undang-undang yang diterapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang biasa disingkat UU PPP. Namun demi melegalkan metode omnibus maka UU PPP sebagai undang-undang induk dari penerbitan peraturan perundang-undangan pun direvisi.⁵⁸ Semakin nyata bahwa kekuasaan politik mempunyai kesanggupan menentukan hidup mati rakyat termasuk kaum buruh (perempuan).

Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja adalah pemicu lahirnya Partai Buruh. Hal ini disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Menurut Iqbal, Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja adalah kekalahan politik sepanjang sejarah Orde Baru sampai saat ini. Undang-undang Cipta Kerja yang tidak kita harapkan malah disahkan, sementara Undang-Undang Perlindungan Pekerja

⁵⁷ PSHK, “LEGISLASI MASA PANDEMI: CATATAN KINERJA LEGISLASI DPR 2020”, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2020). Hlm 186.

⁵⁸ BBC News Indonesia, “Omnibus Law: DPR sahkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, mengapa dituding 'siasat' perbaiki UU Cipta Kerja?” [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61110186), 24 Mei 2022, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61110186>.

Rumah Tangga (UU PPRT) yang kita harap disahkan, justru tidak disahkan. Karena itu, sebagai buruh, sebagai rakyat, sebagai perempuan tidak boleh menyerah.⁵⁹

Ragam, penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut telah meminggirkan partisipasi rakyat termasuk perempuan di dalamnya. Tidak hanya itu, saat perundang-undangan telah diketok palu menjadi undang-undang dan berlaku umum, maka dampaknya juga kepada buruh perempuan. Artinya perempuan belum dianggap sebagai subjek (pelaku) dalam proses pembuatan perundang-undangan. Sebaliknya buruh perempuan dianggap sebagai pihak yang hanya menjadi objek untuk mendapat sosialisasi atas keberlakuan hukum.

III.1.c. Kerja Advokasi Harian Serikat Buruh Semakin Sulit.

Bagi serikat buruh, misi utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Pengurus serikat buruh termasuk pengurus perempuan bertugas memastikan adanya hubungan kerja yang baik dapat tercipta antara buruh dan pemberi kerja, dari buruh masuk bekerja sampai berakhirnya hubungan kerja. Tugas ini membawa serikat buruh pada kerja advokasi harian yang tidak mudah, seperti memastikan adanya perjanjian kerja tertulis, jam kerja, upah, lembur, jaminan sosial, hak atas cuti tahunan, cuti maternitas buruh perempuan, isu kekerasan dan diskriminasi, *union busting*, hingga jika terjadi PHK.

Ragam masalah perburuhan tersebut kadang menggunakan upaya penyelesaian *bipartite* yaitu perundingan dua pihak antara buruh dan pengusaha, namun tak jarang yang sampai ke tingkat *tripartite* dengan melibatkan pihak Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Sudinakertrans) dengan tetap berpedoman pada undang-undang perburuhan yang ada seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, Undang-Undang

⁵⁹ Wawancara langsung dengan Said Iqbal, Presiden Partai Buruh pada 3 Mei 2023.

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.⁶⁰

Advokasi-advokasi harian tersebut kadang menuai hasil yang diharapkan, yaitu keadilan bagi pekerja. Namun banyak juga yang berakhir dengan kebuntuan karena pemberi kerja merasa sangat dibutuhkan di tengah angka pengangguran yang terus bertambah akibat kemudahan PHK yang dilegalkan oleh hukum. PHK adalah momok yang menakutkan di tengah arus informalisasi tenaga kerja.

Saat terjadi perselisihan PHK, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, jika salah satu pihak merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).⁶¹ Pengadilan seolah menjadi tempat bagi buruh memperjuangkan keadilan padahal belum tentu. Prosesnya pun memakan waktu, tenaga, pikiran, dan juga ekonomi. Proses yang cukup panjang dan melelahkan dalam PHI ini kadang membuat buruh apatis dan berhenti di tengah jalan.⁶² Buruh dikondisikan pada pilihan yang sulit karena hukum yang berlaku mengkondisikan serikat buruh terus menerus melakukan kerja-kerja advokasi harian sebagai dampak dari hukum yang tidak berpihak kepada buruh. Lagi-lagi hukum sebagai hasil dari kebijakan politik mengorbankan kondisi kesejahteraan buruh, termasuk buruh perempuan.

⁶⁰ Muhamad Fandrian Adhianto, “Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Dalam Kerangka Heteronom dan Otonom” (Jawa Tengah: PT Pena Persada Kerta Utama, 2023), Hlm 31.

⁶¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Ps. 1 ayat (1).

⁶² Dwi Maryono dan Muhamad Azhar, “Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata” *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018, diakses pada 15 Maret 2023.

Buruh menyadari bahwa pembuatan kebijakan politik pemerintahan berdampak besar bagi kehidupan buruh dan keluarga. Kerja-kerja advokasi harian yang dilakukan oleh serikat buruh selama bertahun-tahun, seolah berputar-putar untuk merespon kasus demi kasus sebagai dampak dari kebijakan politik pemerintah hari ini. Apalagi dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, kerja advokasi harian dapat diprediksi semakin berat dan penuh tantangan.

Bagi buruh perempuan yang menjadi pengurus serikat buruh, kerja-kerja membela anggota juga dirasa semakin berat. Selain berhadapan dengan beban ganda dan hukum yang tidak adil, mereka juga menghadapi birokrasi ketenagakerjaan dalam hal ini Pengawas Ketenagakerjaan yang kurang cekatan dalam menjalankan kerjanya.⁶³ Buruh perempuan menghadapi lapisan-lapisan masalah yang mesti diatasi seiring dengan upaya memperjuangkan hak.

Berangkat dari kondisi yang terus memburuk terkait ketidakpastian hubungan kerja, upah rendah, PHK yang dipermudah karena hukum yang tidak berpihak kepada rakyat (buruh), hingga kasus-kasus perburuhan yang makin sulit untuk diadvokasi itulah maka berbagai serikat buruh dan organisasi rakyat yang terdiri dari 11 unsur bersepakat untuk menghidupkan kembali Partai Buruh pada kongres 4-5 Oktober 2021 di Jakarta.⁶⁴ Kongres ini merupakan catatan sejarah dimana kekuatan serikat-serikat buruh disatukan dalam alat politik. Selain serikat buruh, kongres ini juga melibatkan sektor rakyat lain.

⁶³ Kgs Chris Fither, "Ombudsman dan Paradoks Pengawasan Ketenagakerjaan" Ombudsman 29 Juni 2021, diakses pada 29 Juni 2023 melalui <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--ombudsman-dan-paradoks-pengawasan-ketenagakerjaan>.

⁶⁴ Anggaran Dasar Partai Buruh, Ps. 12 ayat (1).

III.2 Proses Pendirian Kembali Partai Buruh

III.2.a Meningkatkan Kesadaran Massa dengan Konsolidasi dan Aksi Gerakan

Pendirian kembali Partai Buruh pada 2021 tak lepas dari sejarah upaya-upaya penyatuan berbagai organisasi gerakan rakyat. Sebagaimana diketahui Partai Buruh lama yang dipimpin Muchtar Pakpahan sempat mengikuti beberapa pemilu, yaitu pada 1999 dengan nama Partai Buruh Nasional, pemilu 2004 dengan nama Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), dan pemilu 2009 dengan nama Partai Buruh. Pasca itu Partai Buruh menyatakan vakum sampai upaya penyatuan dari berbagai organisasi rakyat.

Pada masa-masa vakum itulah, upaya pembangunan partai politik alternatif dari berbagai gerakan buruh dan gerakan rakyat dilakukan. Menurut Ilhamsyah Ketua Bapilu Partai Buruh, upaya penyatuan gerakan buruh berangkat dari kesadaran buruh yang terus meningkat dari setiap momen yang terjadi. Ilhamsyah menjelaskan bahwa:

“Kesadaran gerakan buruh terus meningkat saat aksi-aksi menuntut pengesahan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) pada 2009. Lalu aksi geruduk pabrik pada 2011 dan 2012 utamanya di daerah Bekasi, Cikarang, Kerawang, Tangerang ini memberi kontribusi yaitu peningkatan kesadaran massa pada gerakan buruh. Ini membuka ruang kesadaran politik bagi gerakan progresif dan juga serikat-serikat pecahan SPSI di masa lalu. Gerakan yang masif itu berkorelasi dengan ideologi kelas pekerja. Ini terlihat pada massa anggota KSPI SPMI yang bersinergi dengan gerakan *go public go politic 2009* oleh FSPMI dengan menitipkan kader mereka ke partai-partai yang ada. Arus kesadaran politik masuk pada serikat-serikat konservatif. Kondisi ini terus berlanjut menjadi mogok nasional hingga konstelasi makin tajam pada 2014, dimana ada serikat yang mendukung Prabowo dan ada yang mendukung Jokowi. Begitulah, sebelumnya gerakan terfragmentasi. Kemudian ada deklarasi GBI di May Day 2016 yang isinya adalah deklarasi sikap politik Gerakan Buruh Indonesia.”⁶⁵

Dalam sejarahnya, deklarasi Gerakan Buruh Indonesia (GBI) ini menyebut diri mereka dengan nama Rumah Rakyat Indonesia (RRI) dan Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) pada 1 Mei

⁶⁵ Wawancara dengan Ilhamsyah, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Buruh pada 30 April 2023.

2016.⁶⁶ ORI adalah ormas yang didirikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dipimpin Andi Gani sebagai alat yang dipersiapkan untuk pembangunan alat politik. Sementara RRI adalah gabungan dari beberapa organisasi yaitu KSPI, Komite Persiapan - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP - KPBI) yang dipimpin oleh Ilhamsyah, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang dipimpin Mudhofir, dan Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) yang dipimpin oleh Herry Hermawan.⁶⁷

Deklarasi yang dilakukan serentak di 33 provinsi di seluruh Indonesia ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan buruh dan rakyat terhadap partai politik yang berkuasa. Ini merupakan bentuk peningkatan kesadaran massa buruh yang dipicu oleh lahirnya Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mengkondisikan kenaikan upah tidak lebih dari 10%. Peraturan Pemerintah yang diteken oleh Jokowi pada 23 Oktober 2015 ini membuat buruh dan rakyat bertekad membangun kekuatan politik baru yang dapat menandingi partai yang berkuasa. Selain sebagai cikal bakal kekuatan politik alternatif, kehadiran RRI dan ORI dimaksudkan juga sebagai alat untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan publik, finansial, sosial, dan jaminan pensiun.⁶⁸ Namun dalam perjalanannya, RRI dan ORI pasca pendiriannya belum berhasil menyatukan kekuatan gerakan rakyat sehingga partai alternatif yang diharapkan belum terealisasi.

Semenara, pada pemilu 2014 dan 2019 Partai Buruh tidak terlibat dalam kancah politik pemilu karena kekurangan sumber daya dan ketiadaan figur yang sanggup memunculkan

⁶⁶ BERITA SATU, “Buruh Deklarasikan Ormas ORI dan RRI di SUGBK”, Beritasatu.com 1 Mei 2016, diakses 24 April 2023 melalui <https://www.beritasatu.com/megapolitan/362842/buruh-deklarasikan-ormas-ori-dan-rri-di-sugbk>.

⁶⁷ Berdasarkan wawancara secara daring via zoom dengan Ilhamsyah, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia - KPBI pada 30 April 2023.

⁶⁸ tempo.co, “Buruh Mendeklarasikan Rumah Rakyat Indonesia” nasional tempo.co 2 Mei 2016, diakses 24 April 2023 melalui <https://nasional.tempo.co/read/767576/buruh-mendeklarasikan-rumah-rakyat-indonesia>.

kepemimpinan politik alternatif. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Dartha Pakpahan berikut:⁶⁹

“Di Partai Buruh lama, waktu itu organisasi yang resmi bergabung hanya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) saja sehingga sumber daya kurang cukup. Sedangkan kalau dari luar kita banyak bergabung dari aktivis perempuan, termasuk waktu itu Reny Jayusman dan artis-artis senior. Beberapa aktivis dari Suara Ibu Peduli juga bergabung meskipun secara personal. Kami mengalami kesulitan waktu itu dalam mencari kawan-kawan tokoh buruh dan buruh perempuan yang mau berjuang di bidang politik, karena banyak dari pengurus perempuan tidak terlalu tertarik di bidang politik. Mereka hanya tertarik dalam gerakan dengan perjuangan yang masih ekonomis dan konvensional. Kami kesulitan menghubungkannya dengan gerakan politik, padahal gerakan politik penting”

Di sisi lain, proses konsolidasi gerakan yang berkejar-kejaran dengan waktu menjelang pemilu terus dilakukan. Namun harus diakui bahwa ada kendala yang dihadapi berkaitan dengan regulasi. Ilhamsyah kembali menjelaskan bahwa:⁷⁰

“Upaya untuk pembangunan kekuatan politik alternatif rupanya terkendala dengan Undang-Undang Partai Politik dimana peserta pemilu harus sudah mendaftar 2,5 tahun sebelum masa pemilu. Karena pada Deklarasi GBI pada Mei 2016 dan harus pada Juli 2016 merupakan batas akhir pendaftaran partai politik baru. Waktu 2 bulan tidak memungkinkan bagi Partai Buruh untuk mendaftarkan kembali ke KPU, maka muncul beberapa opsi, pertama hendak menggunakan RRI namun ditolak, kedua, ORI mengusulkan untuk bloking politik dengan salah satu partai, di sini tidak ketemu jalan, dan ketiga akuisisi. Kita menjajaki dengan beberapa partai politik. Kondisi ini, akhirnya di 2019 terjadi polarisasi gerakan lagi. Ada yang golput atau tidak memilih salah satu pun dari partai politik yang ada atau mendukung salah satu calon presiden seperti yang dilakukan KSPI dengan mendukung Prabowo, atau seperti yang dilakukan oleh SPSI Andi Gani dengan mendukung Jokowi.”

Pasca Pemilu 2019, berbagai organisasi gerakan rakyat terus berkonsolidasi, utamanya serikat-serikat buruh yang membutuhkan kehadiran politik alternatif terus berkonsolidasi demi memunculkan kekuatan politik kelas pekerja yang berhadapan langsung dengan kekuasaan

⁶⁹ Wawancara secara daring via zoom dengan Dartha Pakpahan, ketua umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) sekaligus anak almarhum Muchtar Pakpahan pada 18 Mei 2023.

⁷⁰ Berdasarkan wawancara secara daring via zoom dengan Ilhamsyah, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia - KPBI pada 30 April 2023

politik pemerintah. Upaya mendorong peningkatan kesadaran massa, juga didorong melalui pertemuan-pertemuan yang digelar oleh organisasi-organisasi. Pertemuan itu memperoleh kesimpulan bahwa jalan untuk meningkatkan kesadaran adalah dengan menghidupkan atau mendirikan kembali Partai Buruh. Hal ini senada dengan penjelasan Agus Supriyadi:⁷¹

“Pada tanggal 17 Juni 2021 bertempat di hotel Sofyan Menteng dimulailah kesepakatan untuk menghidupkan Partai Buruh oleh para tokoh buruh yaitu Said Iqbal, Ilhamsyah (Boing), Sunandar, Hendri Saragih (tokoh petani), Sonny Pudjisasono, Agus Supriyadi (Partai Buruh lama) dan banyak lagi para tokoh buruh beserta tokoh-tokoh yang selalu berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Pada pertemuan di hotel Sofyan Menteng telah disepakati untuk: 1. Menghidupkan kembali Partai Buruh dan ikut pemilu tahun 2024; 2. Cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja; 3. Menciptakan Negara Sejahtera (*Welfare State*); dan 4. Kongres ke IV Partai Buruh dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Oktober 2021.”

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Hotel Sofyan itu, masing-masing organisasi kemudian berkonsolidasi bersama dengan anggota-anggotanya untuk menjaring aspirasi dan membuat kesepakatan-kesepakatan untuk mempersiapkan keterlibatan organisasi dalam pemilihan umum di 2024.

Serikat Petani Indonesia (SPI) adalah salah satu organisasi pendiri Partai Buruh. Dalam rangka membangun kekuatan bersama Partai Buruh, SPI menyelenggarakan kongres sebagai bentuk mengakomodir suara-suara anggota hingga diperoleh keputusan untuk berpolitik bersama Partai Buruh. Hal ini senada dengan yang disampaikan Anie berikut:⁷²

“Pertama, keputusan terlibat dalam Partai Buruh dilibatkan dalam kongres yang bersifat mengikat. Bahkan dalam Anggaran Rumah Tangga SPI tertera bahwa syarat anggota SPI salah satunya yakni anggota partai politik yang didirikan oleh SPI atau yang terlibat didalamnya. Kedua, tentu memutuskan bergabung ke Partai Buruh dilalui dengan mekanisme berjenjang. Mulai dari tingkat cabang, wilayah, dan pusat. Di tingkat Pusat,

⁷¹ Berdasarkan wawancara tertulis melalui Whatsapp kepada Agus Supriyadi, Wakil Presiden Partai Buruh pada 28 Mei 2023.

⁷² Wawancara secara daring via Whatsapp dengan Anie Afiana, Dewan Pengurus Nasional Serikat Petani Indonesia pada 30 Juni 2023.

SPI bergabung ke Partai Buruh diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat SPI, yakni forum rapat tertinggi setelah kongres yang dihadiri Majelis Nasional Petani (MNP) dan Badan Pelaksana Pusat (BPP).”

Konsolidasi itu dilakukan juga oleh organisasi pendiri Partai Buruh lain, termasuk yang dilakukan oleh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) sebagai salah satu unsur pendiri Partai Buruh memutuskan untuk membangun politik alternatif. Pasang surut proses penyatuan gerakan pun dialami. Namun dalam rangka pembangunan alat politik alternatif itu, hal yang juga penting adalah mendengar aspirasi dan serapan dari internal anggota KPBI. Sebagai konfederasi yang dibangun berdasarkan penyatuan dari beberapa federasi, KPBI menyelenggarakan survei secara internal untuk anggota-anggota yang tersebar di berbagai wilayah demi menggali informasi terkait pendapat anggota tentang kebutuhan pembangunan politik alternatif.

Dari Survei yang dilakukan KPBI pada 2019 itu, diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas anggota tidak percaya kepada elit politik yang berkuasa. Namun, anehnya survei tersebut juga memperoleh informasi lain bahwa meskipun anggota tidak percaya pada elit politik yang berkuasa, tetapi saat hari pemungutan suara pada pemilu 2019, hampir 72% anggota menyatakan berpartisipasi dan ikut ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).⁷³ Artinya, kesadaran anggota tidak berbanding lurus dengan tindakan yang dilakukan. Situasi inilah yang kemudian terus menjadi pendiskusian di internal KPBI hingga menguatkan komitmen KPBI untuk berpartai. KPBI menjadi salah satu unsur yang paling aktif dari dalam proses pendirian kembali Partai Buruh pada 2020 hingga kongres 2021.

⁷³ buruh.co, “Jelang Diskusi Putaran Kedua Mengenai Partai, Kita Maunya Apa?” redaksi buruh.co, 6 Desember 2020, diakses pada 15 Mei 2023 melalui <https://buruh.co/jelang-diskusi-putaran-kedua-mengenai-partai-kita-maunya-apa/>.

Selain mengkonsolidasikan unsur-unsur di internal KPBI, KPBI juga mengkonsolidasikan unsur-unsur lain di luar KPBI yang berpemahaman sama untuk membangun partai politik sebagai sebuah kekuatan politik. Konsolidasi ini disebut Komite Politik Nasional (Kompolnas) KPBI yang merupakan faksi di Partai Buruh. Komite Politik ini terdiri dari ragam organisasi dan individu-individu yang mendukung dan menghendaki kehadiran kekuatan progresif yang bersepakat untuk membuat partai politik elektoral. Ragam organisasi tersebut antara lain adalah Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri (F-GSBM), Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID), Federasi Pelajar Jakarta (FIJAR), dan individu-individu yang mempunyai komitmen dalam pembangunan partai. Dalam Konsolidasi Komite Politik pra kongres Partai Buruh, mereka menyatakan sikap dukungannya untuk pembangunan politik alternatif sebagai strategi perjuangan untuk masuk dalam parlemen. Komite Politik kemudian terbentuk di berbagai daerah yang mempunyai struktur atau jaringan Komite Politik di level nasional.

Partai Buruh kemudian dihidupkan dan dideklarasikan kembali pada Kongres Partai Buruh pada 4-5 Oktober 2021 oleh gabungan organisasi serikat buruh dan organisasi rakyat sebagai upaya penyatuan kekuatan menjadi gerakan politik untuk melawan ketidakadilan. 11 (sebelas) unsur yang bersepakat untuk mendirikan kembali Partai Buruh adalah Partai Buruh yang lama, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rumah Buruh Indonesia yang didirikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI), Organisasi Rakyat Indonesia yang diinisiasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Rumah Buruh Indonesia yang diinisiasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Rumah Buruh Indonesia Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (RRI FSP KEP), Rumah Buruh Indonesia Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, Forum Pendidik dan Tenaga Honorar Swasta Indonesia, serta

Gerakan Perempuan Indonesia.⁷⁴ Belakangan, bergabung juga Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dan *Urban Poor Consortium* (UPC) yang melibatkan basis Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam kontestasi pemilu tahun ini.

Jala PRT adalah organisasi yang berfokus untuk mengadvokasi dan memberdayakan pekerja rumah tangga (PRT) yang oleh pemerintah bahkan belum diakui sebagai pekerja. Perjuangan untuk memenuhi hak mereka sebagai PRT dirasa cukup berat karena belum ada undang-undang yang memberikan perlindungan secara khusus bagi PRT.⁷⁵ Kebutuhan akan adanya payung hukum yang memberikan perlindungan bagi PRT merupakan kesadaran politik bahwa PRT adalah bagian dari pekerja yang direpresentasikan oleh Partai Buruh. Lita Anggraeni mengungkapkan berikut ini:⁷⁶

“Partai Buruh adalah representasi pekerja termasuk semua jenis pekerja baik pekerja formal, informal, perempuan, laki-laki. Partai Buruh akan menjadi representasi kawan-kawan PRT untuk memperjuangkan akses dan partisipasi dalam gerakan politik.”

Konsolidasi-konsolidasi para pimpinan organisasi yang utamanya laki-laki tersebut telah menjadi tindakan politik membangun partai politik. Kesadaran politik mereka merupakan analisis yang tak terpisahkan dari kondisi objektif rakyat kaitannya dengan kebijakan politik negara. Hal inilah yang menjadi kesimpulan bahwa perjuangan politik layak menjadi strategi untuk mempengaruhi kebijakan politik negara.

⁷⁴ Anggaran Dasar Partai Buruh, Ps. 12 ayat (1), hasil kongres IV Partai Buruh 4-5 Oktober 2021

⁷⁵ Ida Hanifah, “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Kepastian Hukum” Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No.2 – Juni 2020, diakses melalui https://jdihn.go.id/files/804/jurnal%20hukum_2020_669-2256-1-pb.pdf.

⁷⁶ Wawancara secara daring melalui Whatsapp dengan Lita Anggraeni, Koordinator Jala PRT sekaligus Ketua Bidang PRT, Buruh Migran, dan Miskin Kota Partai Buruh pada 1 Juni 2023.

Konsolidasi-konsolidasi organisasi yang dilakukan oleh unsur-unsur pendiri Partai Buruh merupakan aktivitas sah yang dilindungi oleh hukum. Hal ini juga selaras dengan tujuan khusus pembentukan partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam penyelenggaraan politik pemerintahan secara konstitusional.⁷⁷ Pembangunan sarana partisipasi politik masyarakat dalam berdemokrasi ini bisa diwujudkan oleh partai politik termasuk Partai Buruh. Demikianlah Partai Buruh berusaha menjalankan kewajiban memenuhi aspek partisipasi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional, karenanya pelibatan banyak pihak menjadi hal yang tak boleh diabaikan.⁷⁸

Pelibatan ragam pihak dalam pendirian kembali Partai Buruh didahului dengan kongres atau Musyawarah Nasional (Munas) oleh masing-masing organisasi. Hal ini disampaikan Said Iqbal bahwa:⁷⁹

“Hampir 11 unsur pendiri Partai Buruh memutuskan berpartai melalui kongres atau Munas, karenanya dalam struktur Partai Buruh ada struktur Majelis Rakyat yang tidak bisa dibubarkan. Mereka adalah unsur-unsur Partai Buruh lama dan unsur-unsur yang lain.”

Konsolidasi-konsolidasi unsur-unsur Partai Buruh pra-kongres ini merupakan upaya untuk memenuhi aspek partisipasi delegasi kewenangan (*delegated*) menurut teori Arnstein. *Delegated* merupakan bentuk partisipasi dimana keterlibatan warga dalam hal ini unsur-unsur pendiri Partai Buruh mendapat porsi besar dalam merumuskan keputusan berpartai. Hal ini ditunjukkan dengan

⁷⁷ Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Ps. 10 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3).

⁷⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Ps. 13 huruf (c).

⁷⁹ Wawancara langsung dengan Said Iqbal, Presiden Partai Buruh pada 3 Mei 2023.

ragam kongres atau munas yang diselenggarakan oleh masing-masing unsur, sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di masing-masing unsur.

Secara hukum, konsolidasi-konsolidasi unsur-unsur Partai Buruh tersebut merupakan perwujudan dari hak dasar bahwa setiap warga negara berhak untuk menentukan keyakinan politik termasuk mendirikan alat politik berupa partai.⁸⁰ Hal ini dijamin oleh Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak ini merupakan hak atas kebebasan pribadi yang terakumulasi secara kolektif dalam upaya pendirian partai.

Sementara itu, bentuk partisipasi buruh perempuan dalam pengambilan keputusan berpartai tersebut, akan lebih dijelaskan dalam bab 4.

III.2.b Pemenuhan Syarat Administrasi KPU Memicu Percepatan Struktur Partai Buruh

Pasca kongres, Partai Buruh melengkapi kepengurusan di level nasional, provinsi, hingga kota/kabupaten dan kecamatan. Upaya pemenuhan struktur ini selain sebagai upaya untuk memenuhi syarat peserta pemilu, juga sebagai ajang penyatuan ragam organisasi-organisasi di level daerah dalam kerja-kerja bersama. Oleh karena itu Partai Buruh bersiap menuju politik elektoral sehingga secara administrasi Partai Buruh harus memenuhi syarat-syarat administrasi termasuk mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁸¹ Keputusan tersebut, merupakan salah satu syarat yang mesti dipenuhi oleh Partai Buruh untuk menjadi peserta pemilu 2024 sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

⁸⁰ Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps. 23 ayat (1) dan 24 ayat (2).

⁸¹ Tempo.co, “Resmi Terima SK Kemenkumham, Partai Buruh Rencanakan Demo May Day 14 Mei” nasionaltempo.co 11 April 2022, diakses pada 15 Mei 2023 melalui <https://nasional.tempo.co/read/1580992/resmi-terima-sk-kemenkumham-partai-buruh-rencanakan-demo-may-day-14-mei>.

Dalam rangka verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, unsur-unsur pendiri Partai Buruh melibatkan perangkat organisasinya untuk bekerja sama memenuhi proses itu. Hal ini diungkapkan Ika Asih berikut ini:⁸²

“ Saya mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari anggota F-SPMI dengan banyak cara, salah satunya dengan meminta di bus-bus jemputan sepulang kerja dengan membagikan pamflet, kemudian kita input, untuk verifikasi faktual. Saya juga membantu di daerah menghubungi nama-nama yang akan diverifikasi dan menyiapkan data-data yang diperlukan. Verifikasi yang di pusat Ika juga terlibat dan menyiapkan data-data yang diperlukan.”

Selaras dengan yang Ika lakukan, buruh perempuan lain juga bersemangat dalam proses verifikasi itu adalah Roza, sebagaimana ia ungkapkan berikut ini:⁸³

“ Dalam rangka verifikasi, kami buruh perempuan di pabrik saling bekerja sama merekrut dan merangkul teman-teman dengan cara penyampaian visi misi Partai Buruh, begitu juga di kalangan masyarakat dengan kegiatan-positif kaum perempuan...”

Pada Oktober 2022, Partai Buruh dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum No: 9/PL.01.1-Pu/05/2022.⁸⁴ Pada tahap berikutnya, Partai Buruh juga dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU dengan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum No 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024. Dengan bermodal kerja keras dan kerja sama seluruh unsur Partai Buruh di berbagai daerah, akhirnya Partai Buruh

⁸² Wawancara tertulis dengan Ika Asih, Deputi Bidang Sosial Partai Buruh sekaligus Pengurus Pimpinan Cabang FSPMI Kabupaten Bekasi, pada 6 Mei 2023.

⁸³ Wawancara tertulis via Whatsapp dengan Roza Febrianti, Sekretaris Bidang Olahraga, Seni Budaya, dan Pariwisata Partai Buruh sekaligus Pengurus Dewan Eksekutif Nasional FSPMI pada 29 April 2023.

⁸⁴ Detik News, “18 Parpol Dinyatakan Lolos Verifikasi Administrasi, 2 Gagal” Detiknews 14 Oktober 2022, diakses pada 13 Mei 2023 melalui: <https://news.detik.com/pemilu/d-6347700/18-parpol-dinyatakan-lolos-verifikasi-administrasi-2-gagal>.

dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 6.⁸⁵ Dengan lolosnya Partai Buruh dalam verifikasi administrasi dan faktual, maka hal ini sekaligus pengakuan bahwa Partai Buruh telah mempunyai badan hukum, memenuhi struktur di 100 persen provinsi, 75 persen kota/kabupaten, 50 persen kecamatan di seluruh Indonesia, dan memenuhi kuota 30% perempuan.⁸⁶ Struktur yang tersebar di berbagai tingkatan ini adalah alat partai untuk melakukan kerja-kerja advokasi, pendidikan, propaganda, termasuk media untuk menjaring seluas mungkin konstituen, agar memperoleh dukungan publik pada pemilu 2024 nanti.

Partai Buruh didirikan kembali dengan semangat untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan kebijakan di Senayan, kebijakan yang sanggup meningkatkan ruang demokrasi dan partisipasi untuk kesejahteraan rakyat.⁸⁷ Ruang demokrasi dan partisipasi yang dibangun oleh berbagai unsur pendiri Partai Buruh menggambarkan bahwa pembangunan kembali Partai Buruh adalah upaya serius untuk menjadi bagian dari parlemen. Semangat gotong royong dan partisipasi dari ragam organisasi ini dilakukan sebagai upaya *go politic* dimana rakyat terutama buruh tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan di tempat kerja, dalam ruang-ruang mediasi, maupun pengadilan. Demikian juga bagi petani, rakyat miskin kota dan desa, nelayan, kaum perempuan yang selama ini menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Partai Buruh yang merupakan gabungan dari serikat-serikat buruh dan organisasi rakyat menambah metode perjuangan bukan hanya di parlemen jalanan tetapi juga berusaha masuk menjadi bagian dari parlemen di gedung

⁸⁵ CNN Indonesia, “3 Partai Pendatang Baru Peserta Pemilu 2024: Gelora, PKN, Partai Buruh, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221214181216-617-887453/3-partai-pendatang-baru-peserta-pemilu-2024-gelora-pkn-partai-buruh), 14 Desember 2022, diakses pada 13 Mei 2023, melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221214181216-617-887453/3-partai-pendatang-baru-peserta-pemilu-2024-gelora-pkn-partai-buruh>.

⁸⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ps. 173 ayat (2).

⁸⁷ Ferri Nurzali, “Partai Buruh Optimis Nembus Senayan” [partaiburuh.or.id](https://partaiburuh.or.id/berita/216) diakses pada 15 Maret 2023 melalui <https://partaiburuh.or.id/berita/216>.

DPR. Peluang ini terbuka bagi siapapun, baik kader Partai Buruh yang laki-laki maupun perempuan.

Proses pendirian dan pasca pendirian kembali Partai Buruh di atas adalah rangkaian konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan oleh para pimpinan organisasi yang utamanya didominasi oleh laki-laki sebagai pihak yang melakukan konsolidasi secara eksternal sehingga tersimpulkan keputusan untuk berpartai. Sedangkan buruh perempuan, melakukan konsolidasi bertindak secara internal di masing-masing organisasi, baik dalam pertemuan-pertemuan basis, hingga pengumpulan KTP di bus-bus.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa, terdapat pembagian peran antara buruh perempuan dan laki-laki, dimana perempuan lebih berperan melakukan kerja-kerja di internal organisasi, dan pihak laki-laki yang mayoritas adalah pucuk pimpinan melakukan kerja eksternal yang lebih terlihat secara publik. Diakui atau tidak, inilah yang terjadi. Artinya pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan diakomodir melalui jalur-jalur internal, namun yang muncul secara publik tetap laki-laki. Partai Buruh selayaknya memunculkan politik baru yang mempunyai karakter berbeda dengan politik yang selama ini digunakan oleh elit-elit politik oligarki, dimana kekuasaan hanya dijalankan oleh segelintir elit atau golongan demi menjaga kepentingannya. Politik Partai Buruh selayaknya membuka peluang besar bagi perempuan kelas pekerja hadir secara substantif dalam kancah perpolitikan baik di level daerah maupun nasional dengan agenda perjuangan pembebasan perempuan, yaitu perempuan tampil secara publik sehingga tidak tersandera dalam domestikasi.⁸⁸ Pembebasan perempuan yang mesti diupayakan Partai Buruh adalah pembebasan substansial bukan sebagai *lips service* semata. Pembebasan perempuan

⁸⁸ Luky Sandra Amalia, "Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa" Pusat Riset Politik BRIN, diakses pada 19 Juli 2023 melalui: <https://politik.brin.go.id/kolom/etnisitas-gender-agama/kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa/>.

substansial merupakan upaya mengusung isu perlawanan atas subordinasi, memberi warna politik tidak maskulin, mengedepankan solidaritas, kesetaraan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, nir kekerasan dan diskriminasi.⁸⁹

Dalam kacamata feminisme, ketidakmunculan perempuan secara publik disebabkan oleh relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Masyarakat masih menormalisasi bahwa laki-laki adalah pihak yang selayaknya muncul secara publik dan perempuan berada dalam ranah domestik. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan gender dalam mengakses kesempatan sehingga berimplikasi adanya ketidakadilan gender. Jika dibiarkan, hal ini juga berakibat mempengaruhi minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan di tubuh partai. Karenanya membutuhkan pengarusutamaan gender untuk menciptakan ruang-ruang bagi buruh perempuan agar dapat mengakses keadilan gender.

Posisi keterlibatan dan partisipasi buruh perempuan secara lebih detail akan menjadi pembahasan dalam bab 4 berikut.

⁸⁹ Wawancara langsung dengan Dian Septi Trisnanti, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), anggota Komite Politik Nasional Partai Buruh, pada 7 Maret 2023.